

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL DAN AKREDITASI DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA

Hasni Mudarti¹, Yuli Fatrisna², Jamilus³

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri
Muhammad Yunus Batu Sangkar

E-mail : [1hasnimudarti@gmail.com](mailto:hasnimudarti@gmail.com) , [2yulifatrisna@gmail.com](mailto:yulifatrisna@gmail.com) ,
[3jamilus@iainbatusangkar.ac.id](mailto:jamilus@iainbatusangkar.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan akreditasi pada Lembaga Pendidikan Islam (LPI) melalui studi literatur. Kajian ini dilakukan dengan menelaah secara kritis berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan untuk mengkonseptualisasikan SPME, mengidentifikasi landasan normatifnya dalam Al-Qur'an (prinsip Ihsan dan Amanah), serta menguraikan tantangan dan peluang implementasinya di LPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPME berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan katalis peningkatan mutu yang selaras dengan tuntutan global. Namun, LPI menghadapi dilema unik dalam menjembatani standar akreditasi nasional yang kuantitatif dengan kekhasan pendidikannya yang bersifat kualitatif, seperti pembinaan karakter dan integrasi nilai Islam. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi implementasi SPME yang efektif harus diimbangi dengan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan inovasi dalam mendokumentasikan identitas keislaman sebagai keunggulan kompetitif.

Kata Kunci: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, Akreditasi, Lembaga Pendidikan Islam

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the External Quality Assurance System (SPME) and accreditation at Islamic Educational Institutions (LPIs) through a literature review. This study was conducted by critically reviewing various scientific sources, such as journal articles, books, and policy documents, to conceptualize the SPME, identify its normative foundation in the Qur'an (the principles of Ihsan and Amanah), and outline the challenges and opportunities for its implementation at LPIs. The results indicate that the SPME functions as an accountability instrument and a catalyst for quality improvement that aligns with global demands. However, LPIs face a unique dilemma in bridging the quantitative national accreditation standards with the qualitative characteristics of their education, such as character development and the integration of Islamic values. This study concludes that an effective SPME implementation strategy must be balanced with a strengthened Internal Quality

Assurance System (SPMI) and innovation in documenting Islamic identity as a competitive advantage.

Keywords: External Quality Assurance System, Accreditation, Islamic Educational Institutions

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya teknologi komunikasi, mobilitas manusia yang kian bebas, serta meningkatnya interdependensi antarnegara, mutu pendidikan menempati posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan tidak lagi dipahami sebatas proses transfer pengetahuan, tetapi menjadi instrumen untuk membentuk individu yang adaptif, kreatif, dan kompetitif dalam persaingan global. Standar kualitas lembaga pendidikan pun mengalami transformasi, dari yang semula mengutamakan keseragaman menuju orientasi pada relevansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Di tengah perubahan besar ini, lembaga pendidikan dituntut untuk memastikan bahwa setiap luaran (output) yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu mendapatkan pengakuan internasional. Tantangan ini semakin besar bagi lembaga pendidikan di Indonesia, terutama Lembaga Pendidikan Islam (LPI) yang memiliki karakteristik, visi, dan misi yang berbeda dibandingkan institusi pendidikan umum.

Lembaga Pendidikan Islam, mulai dari madrasah hingga perguruan tinggi Islam, mengemban

mandat ganda: pertama, memastikan penguasaan ilmu pengetahuan umum sesuai tuntutan perkembangan zaman; kedua, menanamkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi akhlaqul karimah. Kombinasi antara tuntutan akademik modern dan pembinaan moral spiritual menjadikan LPI berada pada posisi unik, sekaligus menghadapi tantangan manajerial yang kompleks (Ananto & Mustofa, 2023). Di satu sisi, mereka harus mengikuti arus perkembangan sains dan teknologi yang sangat cepat, sementara di sisi lain tetap mempertahankan identitas keislaman sebagai ciri khas penyelenggaraan pendidikan. Tuntutan ini menciptakan dualitas orientasi yang harus dipadukan secara harmonis dalam proses pendidikan, tata kelola lembaga, dan strategi penjaminan mutu.

Masalah muncul ketika standar penjaminan mutu eksternal yang diterapkan secara nasional lebih banyak berorientasi pada indikator-indikator kuantitatif, seperti rasio dosen terhadap mahasiswa, produktivitas penelitian, publikasi ilmiah, sarana prasarana, efektivitas pengelolaan pembelajaran, serta penjaminan mutu internal yang terstruktur. Meskipun aspek tersebut sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas,

namun belum tentu selaras sepenuhnya dengan tujuan khas pendidikan Islam. Nilai spiritualitas, etika, karakter, dan pengabdian masyarakat berbasis keislaman tidak selalu mudah diukur melalui instrumen standar yang kaku dan cenderung bersifat administratif. Hal ini menimbulkan gap antara apa yang dinilai oleh sistem akreditasi dengan apa yang dianggap sebagai keberhasilan pendidikan menurut perspektif Islam. Pertanyaan kritis yang sering muncul adalah bagaimana cara memastikan bahwa LPI mampu memenuhi tuntutan standarisasi modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam yang menjadi ruh pendidikan itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) hadir sebagai instrumen penting dalam menilai dan menjamin kualitas pendidikan. Melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), lembaga pendidikan dinilai berdasarkan kriteria yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global. Akreditasi tidak hanya memberikan status atau peringkat mutu, tetapi juga menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana sistem penjaminan mutu internal (SPMI) telah berjalan secara konsisten. Dengan demikian, akreditasi berfungsi sebagai feedback loop yang mendorong lembaga untuk terus memperbaiki diri dan menyesuaikan layanan pendidikannya dengan kebutuhan pemangku kepentingan (Fatimah &

Subagiyo, 2022; Budiarto & Nugroho, 2023). Pada titik ini, akreditasi dapat menjadi momentum strategis bagi LPI untuk melakukan refleksi mendalam terhadap efektivitas tata kelola, integrasi nilai keislaman, serta relevansi kurikulum dan proses pembelajaran.

Namun demikian, pelaksanaan penjaminan mutu eksternal tidak terlepas dari tantangan. Banyak LPI yang masih memandang akreditasi sebagai beban administratif yang memerlukan pengumpulan dokumen dalam jumlah besar, bukan sebagai proses evaluasi yang seharusnya berjalan alami dalam budaya mutu lembaga. Selain itu, perbedaan sumber daya antar-LPI, baik dari segi pendanaan, keterampilan tenaga kependidikan, maupun sarana prasarana, membuat capaian akreditasi sering kali tidak mencerminkan kualitas sebenarnya dari lembaga. Lembaga yang memiliki sumber daya besar cenderung lebih mudah mencapai akreditasi unggul, sementara lembaga kecil mengalami kesulitan walaupun memiliki kualitas pembinaan karakter yang baik. Hal ini memperlihatkan bahwa instrumen akreditasi perlu terus dikembangkan agar lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi kekhasan pendidikan Islam.

Tantangan LPI semakin bertambah dengan adanya transformasi besar dalam dunia pendidikan global, terutama percepatan digitalisasi yang terjadi selama pandemi COVID-19. Perubahan metode pembelajaran yang beralih ke model daring dan

blended learning menuntut LPI beradaptasi dengan cepat. Mereka harus menyediakan platform pembelajaran digital, melatih guru dan dosen dalam pemanfaatan teknologi, serta memastikan bahwa kualitas interaksi pembelajaran tetap terjaga meskipun dilakukan secara virtual. Penjaminan mutu dalam pembelajaran digital tidak hanya menilai aspek teknis seperti keterjangkauan internet atau penggunaan Learning Management System (LMS), tetapi juga menyangkut bagaimana nilai-nilai Islam tetap dapat disampaikan secara efektif melalui media digital (Ma'arif & Nursikin, 2024; Sholeh & Efendi, 2023). Pertanyaan yang muncul adalah apakah instrumen akreditasi saat ini mampu mengukur kualitas pendidikan keislaman dalam konteks pembelajaran digital yang tidak lagi berbatas ruang?

Selain digitalisasi, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) juga membawa perubahan signifikan. Kebijakan ini menuntut lembaga pendidikan untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap peluang pembelajaran di luar kampus, seperti magang, penelitian, proyek kemanusiaan, dan pertukaran pelajar. Bagi LPI, kebijakan ini memberikan tantangan tambahan, yaitu bagaimana memastikan bahwa kegiatan MBKM tidak mengikis identitas keislaman mahasiswa, tetapi justru memperkaya pengalaman dan memperkuat kompetensi profesional mereka. Mahasiswa LPI dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif, literasi digital, kecakapan komunikasi, dan

pengetahuan lintas disiplin untuk menjawab kebutuhan industri (Ananda dkk., 2022; Arlina & Mujamil, 2023). Kondisi ini memaksa LPI untuk melakukan redesign kurikulum agar sejalan dengan kebijakan nasional, tanpa mengabaikan basis nilai syariah dan karakter keislaman yang menjadi jati diri lembaga (Mufidah, 2023).

Oleh karena itu, akreditasi dan SPME harus dipandang tidak sekadar sebagai alat evaluasi, melainkan sebagai strategi transformasi lembaga. SPME dapat membantu LPI mengidentifikasi kelemahan, mengoptimalkan potensi, serta merancang intervensi strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dengan adaptasi instrumen yang tepat, akreditasi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan standar nasional, tuntutan global, dan nilai-nilai keislaman yang melekat kuat dalam sistem pendidikan Islam. Penguatan budaya mutu di LPI harus dilakukan secara menyeluruhan, melibatkan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan. Pada akhirnya, akreditasi akan menjadi sarana untuk memperkuat daya saing LPI, memperkokoh identitas kelembagaan, dan memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang tinggi.

Melalui kajian mendalam mengenai SPME, akreditasi, dan tantangan pendidikan Islam kontemporer, penelitian ini berupaya

menjawab bagaimana LPI dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika penjaminan mutu di lembaga pendidikan Islam serta menawarkan peluang penguatan mutu yang relevan dengan perkembangan zaman.

B. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan akreditasi pada lembaga pendidikan. Studi literatur dipilih karena ruang lingkup kajian yang berfokus pada konsep, regulasi, praktik implementasi, serta perkembangan terkini terkait SPME dapat ditelusuri melalui berbagai sumber ilmiah yang telah dipublikasikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap teori, hasil penelitian sebelumnya, kebijakan, serta dokumen resmi yang menjadi landasan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi dan implementasi SPME pada Lembaga Pendidikan Islam (LPI) menghasilkan dinamika yang kompleks, penuh tantangan, namun juga membuka peluang strategis. Pembahasan berikut akan menguraikan hasil analisis terhadap konsep, landasan,

instrumen, serta realitas implementasi SPME dalam konteks LPI.

A. Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Siklus Berkelanjutan untuk Akuntabilitas dan Peningkatan

Hasil analisis mengonfirmasi bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan sebuah siklus berkelanjutan yang terdiri dari dua pilar utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI berfungsi sebagai jantung dari peningkatan mutu, di mana lembaga secara mandiri menjalankan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) untuk memastikan standar internalnya terpenuhi dan terus ditingkatkan. Siklus ini bukanlah kegiatan insidental, melainkan budaya kerja yang harus diinternalisasi. Pembahasan ini sejalan dengan temuan Budiarto & Nugroho (2023) yang menekankan bahwa keberhasilan SPMI menjadi fondasi esensial bagi sebuah lembaga. Fondasi ini yang memungkinkan lembaga tidak hanya siap menghadapi evaluasi eksternal, tetapi juga mampu menjalankan operasionalnya dengan standar yang konsisten dan terukur. Sementara itu, SPME berperan sebagai validator eksternal yang dilakukan oleh pihak independen seperti BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Diskusi ini mengungkap bahwa SPME memiliki fungsi multi-dimensi, tidak hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai pemenuhan akuntabilitas publik, validasi mutu, dasar perizinan, serta alat

benchmarking bagi lembaga untuk melakukan perbaikan strategis pada siklus SPMI berikutnya. Dengan demikian, terdapat hubungan simbiosis mutualistik antara SPMI dan SPME, di mana SPMI yang kuat menghasilkan data dan budaya mutu yang baik, yang pada akhirnya mempermudah proses SPME, dan hasil SPME memberikan umpan balik objektif untuk penyempurnaan SPMI.

B. Landasan Normatif SPME dalam Al-Qur'an: Ihsan dan Amanah sebagai Fondasi Filosofis

Pembahasan yang menarik terletak pada ditemukannya keselarasan yang kuat antara prinsip-prinsip SPME dengan nilai-nilai fundamental dalam Al-Qur'an. Analisis ini menunjukkan bahwa motivasi untuk menjalankan penjaminan mutu pada LPI tidak hanya bersifat administratif atau pragmatis, melainkan juga memiliki landasan normatif yang dalam. Prinsip Ihsan (berbuat yang terbaik) yang tercantum dalam Q.S. An-Nahl: 90 menjadi roh dari seluruh proses penjaminan mutu. Dalam konteks ini, akreditasi tidak dilihat sebagai tujuan akhir untuk meraih predikat, tetapi sebagai sarana verifikasi eksternal atas sejauh mana prinsip Ihsan telah diwujudkan dalam setiap aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, prinsip Amanah (tanggung jawab atas kepercayaan) dan Al-'Adl (keadilan) dalam Q.S. An-Nisa: 58 memberikan kerangka akuntabilitas dan tata kelola yang etis. Bagi LPI, amanah berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan masyarakat dan orang tua. Bagi badan akreditasi, prinsip Al-'Adl

menuntut objektivitas dan independensi dalam menilai. Dengan demikian, pendekatan SPME dalam perspektif Islam melampaui sekadar pemenuhan standar teknis dan masuk ke dalam ranah ibadah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, di mana mutu yang unggul dan akuntabel adalah manifestasi dari ketakwaan.

C. Akreditasi sebagai Instrumen Utama SPME: Pergeseran Paradigma Menuju Outcome

Pembahasan mengenai instrumen akreditasi mengungkap adanya pergeseran paradigma yang signifikan. Instrumen lama yang berfokus pada penilaian input (seperti jumlah buku di perpustakaan atau kualifikasi dosen) telah berkembang menjadi instrumen yang lebih kompleks dan holistik, seperti Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 yang berbasis 9 Kriteria. Hasil analisis terhadap ke-9 kriteria ini menunjukkan bahwa fokus penilaian kini lebih ditekankan pada outcome dan dampak dari sebuah lembaga pendidikan. Kriteria seperti "Luaran dan Capaian Tri Dharma" (Kriteria 9) yang menilai masa tunggu kerja lulusan dan kepuasan pengguna, serta "Penelitian" dan "Pengabdian kepada Masyarakat" (Kriteria 7 & 8) yang menitikberatkan pada relevansi dan dampak, membuktikan hal tersebut. Temuan ini konsisten dengan pendapat Rahman (2020) yang menyatakan bahwa akreditasi adalah validasi publik atas kredibilitas. Prosesnya yang sistematis, mulai dari

Evaluasi Diri yang jujur, Asesmen Lapangan untuk verifikasi, hingga Penetapan Keputusan, dirancang untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan prinsip independensi, transparansi, dan objektivitas. Oleh karena itu, LPI dituntut untuk tidak hanya mampu mengumpulkan data kuantitatif, tetapi juga mampu menyusun narasi kualitatif yang menggambarkan efektivitas dan dampak dari seluruh aktivitasnya.

D. Akreditasi dalam Konteks Lembaga Pendidikan Islam (LPI): Menjembatani Misi Ganda

Analisis terhadap konteks LPI mengungkap kompleksitas unik dalam proses akreditasi. LPI menghadapi tantangan untuk memenuhi dua misi sekaligus: mencapai standar nasional yang terukur dan mempertahankan identitas serta nilai-nilai keislamannya. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen akreditasi umum seringkali kurang mampu menangkap dan mengukur aspek-aspek kualitatif yang menjadi kekhasan LPI, seperti kurikulum integratif yang menyatukan ilmu umum dan agama, pembinaan karakter dan spiritual mahasiswa, serta relevansi lulusan yang tidak hanya kompeten secara profesional tetapi juga berakhlaqul karimah. Tantangan terbesarnya terletak pada bagaimana menerjemahkan keberhasilan dalam aspek-aspek spiritual dan karakter ini menjadi data dan narasi yang dapat diverifikasi dan diakui oleh asesor eksternal. Oleh karena itu, LPI dituntut untuk proaktif dalam mengembangkan instrumen

dan metodologi evaluasi internal yang inovatif, yang dapat mendokumentasikan "nilai tambah" keislaman ini sebagai bagian dari bukti kinerja unggulannya

E. Implementasi, Tantangan, dan Peluang SPME pada Lembaga Pendidikan Islam

Implementasi SPME pada LPI merupakan sebuah journey yang memadukan strategi manajerial modern dengan nilai-nilai keislaman. Pembahasan ini mengidentifikasi bahwa strategi kunci keberhasilan terletak pada: (1) Pembangunan budaya mutu yang diinspirasi oleh nilai Ihsan dan Amanah, (2) Pembentukan tim task force yang data-literate, (3) Optimalisasi sistem informasi digital untuk memastikan traceability data, dan (4) Integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam standar dan instrumen internal. Namun, di balik strategi tersebut, LPI menghadapi tantangan unik yang tidak dialami oleh lembaga pendidikan umum.

Tantangan paling krusial adalah kesenjangan antara kuantifikasi dan kekhasan pendidikan Islam. Instrumen akreditasi yang cenderung terstandardisasi dan kuantitatif sering kali tidak cukup sensitif untuk menangkap capaian kualitatif inti dari LPI, seperti pembentukan akhlaqul karimah, integrasi keilmuan, dan dampak spiritual dari pengabdian masyarakat (Sudarmo, 2022; Ananto & Mustofa, 2023). Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun kapasitas SDM dalam menghadapi dinamika baru seperti MBKM dan digitalisasi,

serta beban administratif yang dirasakan memberatkan (Saputra, 2024). Meskipun demikian, pembahasan ini juga mengungkap peluang strategis yang dapat dimanfaatkan LPI. Pertama, akreditasi yang baik menjadi alat legitimasi yang powerful untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas global (Fatimah & Subagiyo, 2022). Kedua, proses SPME memaksa LPI untuk memperkuat SPMI, menciptakan siklus peningkatan mutu berkelanjutan. Ketiga, status akreditasi membuka peluang kolaborasi dan jejaring yang lebih luas. Yang paling penting, tantangan dalam mendokumentasikan kekhasan Islam justru menjadi peluang untuk menjadikan identitas keislaman sebagai keunggulan kompetitif. Dengan mendemonstrasikan secara sistematis dalam LED bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian, LPI dapat memposisikan diri bukan hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi sebagai pencetak generasi yang unggul secara akademik dan mulia secara akhlak.

E. Kesimpulan

SPME dan Akreditasi merupakan mekanisme fundamental untuk menjamin mutu dan menegakkan akuntabilitas Lembaga Pendidikan Islam (LPI) terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan, yang sejalan dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dinamika global. Secara normatif, seluruh proses penjaminan mutu dalam LPI berakar pada ajaran

Islam, khususnya pada prinsip Ihsan (keunggulan, melakukan yang terbaik) dan Amanah/Al-'Adl (tanggung jawab, akuntabilitas, dan tata kelola yang adil), sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nahl: 90 dan Q.S. An-Nisa: 58).

LPI menghadapi tantangan ganda: pertama, perlunya adaptasi cepat terhadap kebijakan transformatif seperti MBKM dan digitalisasi; dan kedua, kesulitan dalam kuantifikasi dan pengukuran aspek kualitatif (pembinaan karakter, spiritualitas) yang menjadi kekhasan utama pendidikan Islam, di tengah instrumen akreditasi yang dominan berbasis metrik kuantitatif.

Implementasi SPME yang efektif dapat menjadi peluang strategis bagi LPI untuk menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan, meningkatkan kredibilitas publik, dan pada saat yang sama, secara sistematis mendokumentasikan serta memperkuat identitas keislaman otentik mereka melalui integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhubra Abdul Jabbar, M. R., Chotimah, C., & Sulistyorini. (2025). Integrasi Nilai Keislaman dalam Manajemen Strategik untuk Membangun Keunggulan Kompetitif Lembaga Pendidikan Islam di Era Globalisasi Digital. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 185-192.

- Ananda, R., Harahap, H., & Simanjuntak, S. N. (2022). Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 1-12.
- Ananto, E., & Mustofa, A. (2023). Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Islam Melalui Integrasi Nilai-Nilai Pesantren dalam Standar Akreditasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 32-45.
- Arlina, U., & Mujamil, Q. (2023). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). *Jurnal Skills*, 7(1), 12-25.
- Budiarto, T., & Nugroho, D. S. (2023). Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal dalam Peningkatan Daya Saing Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 121-135.
- Cahyono, B. S., & Puspita, D. (2022). Manajemen Strategis Menuju Akreditasi Unggul di Lembaga Pendidikan Islam. Yogyakarta: K-Media.
- Fatimah, S., & Subagijo, R. (2022). Akreditasi sebagai Alat Ukur Kualitas Lulusan Pendidikan Islam di Era Digital. *Tarbiyah Journal of Islamic Education*, 10(1), 56-70.
- Harmin, H., & Rosnani, R. (2022). Aplikasi Pengelolaan E-Document Sistem Penjaminan Mutu Internal Menggunakan Metode User-Centered Design. *Psypathic: Jurnal Ilmiah Psikologi, Manajemen Pendidikan dan Sosiohumanika*, 10(1).
- Hidayat, A., & Wulandari, S. (2021). Tantangan dan Solusi Akreditasi pada Madrasah Aliyah di Indonesia. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(3), 201-215.
- Imroni, M. H. (2025). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Berbasis Nilai Islam dalam Upaya Pembentukan Akhlak Santri. *Journal on Education*, 7(2), 9931-9940.
- Kusharyati, I., & Muhlis, A. (2025). Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam Dalam Prespektif Manal Hani. *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 24(1), 413-428.
- Ma'arif, M. M., & Nursikin, R. S. (2024). Transformasi Digital dan Implikasinya Terhadap Manajemen Pendidikan Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, 8(1), 1-15.
- Mufidah, L. I. (2023). Analisis Pendidikan Nilai Islam di Era Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 12(1), 22-38.

Penerbit Widina. (2025). Strategi Adaptasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Islam di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(3), 53-65.

Rahman, M. T. (2020). Manajemen Strategik Mutu Pendidikan Islam: Peran Akreditasi dalam Membangun Kepercayaan Publik. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Saputra, B. (2024). Optimalisasi Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Pendekatan Berbasis Data dan Akreditasi. *Jurnal Riset Manajemen Pendidikan*, 11(1), 45-58.

Sholeh, M. I., & Efendi, N. (2023). Integrasi Teknologi dalam Manajemen Pendidikan Islam: Meningkatkan Kinerja Guru di Era Digital. *Jurnal Tinta*, 5(2), 104-126.

Sudarmo, D. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Islam dalam Standar Akreditasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1-15.

Wahyudi, S. (2021). Peran Teknologi dalam Pengelolaan Mutu Pendidikan Islam dan Implikasinya terhadap Akreditasi. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 5(2), 112-125